

**IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM MENINGKATKAN
KINERJA PEMERINTAH DAERAH
DILINGKUNGAN KECAMATAN DATUK BANDAR
TANJUNG BALAI**

Anggi Pratama Nst, S.E, M.Si

Bagus Handoko, S.E, MSi

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dapat diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumber yang dihubungkan dengan hasil dari pelayanan ditingkat pemerintahan. Anggaran itu sendiri disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang diorientasikan kepada output. Siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran terdiri dari beberapa tahap (fase) yaitu : Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Implementasi dan Tahap Pelaporan dan Evaluasi. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kantor yang ada di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dengan Studi kasus dikecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Data diambil menggunakan kuisioner pada yang didapat dari Pengguna Kuasa Anggaran dan Bendahara pada 5 kelurahan dan 1 Kecamatan pada Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai yang kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa seluruh aktivitas anggaran berbasis kinerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi sebagai bentuk peningkatan kinerja di seluruh instansi yang ada kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai telah sesuai atau berjalan dengan baik

Kata Kunci : Perancaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Anggaran dan Evaluasi Anggaran dan Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Implementasinya Pengelolaan Anggaran Daerah Merupakan proses yang memerlukan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, dan memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak pemerintah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan di capai. sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak pemerintah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan di capai, sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.

Selanjutnya, anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di semua aktivitas berbagai unit kerja. Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, dituntut adanya suatu perubahan dalam pola pikir untuk menyusun program-programnya, dan mendisain aktivitas anggarannya betul-betul berdasarkan orientasi untuk mencapai satu tujuan. Dalam pengelolaan uang negara sesuai dengan Undang-Undang No.17 tahun 2003 mengamanatkan bahwa di dalam menyusun anggaran bagi instansi pemerintah harus berorientasi pada kinerja. Hal ini diperkuat oleh Mardiasmo (2001) yang menyatakan bahwa dalam penyusunan anggaran daerah yang dikehendaki adalah: (a) Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik; (b) Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*); (c) Anggaran Daerah harus

mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran; (d) Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan; (e) Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait; (f) Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Sesuai dengan hasil survey beberapa waktu yang lalu, dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja pada Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara, beberapa instrumen kinerja yang seharusnya dijadikan salah satu unsur didalam perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis kinerja belum mampu diterapkan. Seperti penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi landasan bagi Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Pertengahan tahun 2012 Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai baru menerapkan standar pelayanan minimal dalam hal pelayanan publik akan tetapi dalam hal penerapan untuk perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis kinerja belum terlaksana seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebelum tahun 2012 tidak memiliki standar pelayanan minimal maupun standar operasional prosedur yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan anggaran dalam hal pelayanan publik bidang ketenagakerjaan. Akan tetapi penerapannya dilapangan belum seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat pada beberapa komponen-komponen biaya yang ada pada standar pelayanan minimal belum terakomodir pada rencana kerja anggaran Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, yang mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat belum terlaksana secara maksimal.

Untuk itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dibidang Akuntansi Publik dengan judul Implementasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah dengan cakupan wilayah penelitian dipusatkan pada 1 (satu) Kecamatan yaitu pada Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan masalah dalam rancangan penelitian ini adalah Bagaimana implementasi dari anggaran berbasis kinerja yang diukur berdasarkan Perencanaan, Pelaksanaan Pelaporan dan Evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah terkhusus dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana implementasi dari anggaran berbasis kinerja yang diukur berdasarkan Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah terkhusus dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Hubungan Anggaran Dengan Kinerja Pemerintah

Dalam realitanya masih banyak kinerja pemerintah yang harus diperbaiki dalam hal ini diukur berdasarkan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki kebutuhan mendasar dalam mewujudkan pelaksanaan otomoni yang nyata, luas dan dapat dipertanggungjawabkan. Perancangan yang baik sangat berdampak pada kinerja aparatur pemerintah dan juga akan dapat meningkatkan kinerja anggaran daerah.

Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Hawkins (The Oxford Paperback Dictionary, 1979) mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut: "*Performance is: (1) the process or manner of performing, (2) a notable action or achievement, (3) the performing of a play or other entertainment*". Sementara dalam buku modul Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, disebutkan bahwa kinerja adalah pencapaian keluaran (*output*) atau dampak (*outcome*) yang diperoleh oleh orang atau sekumpulan orang dalam suatu organisasi yang melakukan kegiatan atau operasi demi pencapaian misi dan tujuan organisasi melalui melaksanakan suatu urutan kegiatan yang terencana. Atmosudirdjo (dalam Haryanto, 2009), kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian

tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan- kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintahan daerah dan program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga identifikasi *input*, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik. Dengan demikian pengeluaran Pemerintah Daerah dapat menciptakan ukuran kinerja yang akan mempermudah dalam melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Karena merupakan kebijakan Pemerintah Daerah, maka orientasi Pemerintah Daerah pada pembangunan akan lebih dekat dengan gerak dinamis masyarakatnya. Artinya akan bersifat terbuka sehingga tuntutan dan kebutuhan publik masuk dalam penentuan strategi, prioritas dan kebijakan alokasi.

Peran Pemerintah Daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan Pemerintah Pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Konsep *Value For Money* (VFM) penting bagi Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti:

1. efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*;
4. alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
5. meningkatkan *publik cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Dalam (Sinambela, 2003) disebutkan bahwa Partisipasi dalam penyusunan dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Para bawahan yang merasa aspirasinya dihargai dan mempunyai pengaruh pada anggaran yang disusun akan lebih mempunyai tanggungjawab dan konsekuensi moral yang meningkatkan kinerja sesuai yang ditargetkan dalam anggaran.

BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kinerja pemerintah dilingkungan kecamatan Datuk Bandar.

A. Defenisi Operasional Variabel

Adapun yang menjadi parameter operasional variabel dalam penelitian ini adalah Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dengan indikator Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Kinerja Pemerintah Perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan keseluruhan sampel yang akan diteleti yaitu berasal dari Pengguna Kuasa Anggaran, Bendahara Baik di lingkungan Kecamatan dan seluruh Kelurahan dikecamatan Datuk Bandar yaitu sebanyak 20 orang responden dan juga didukung oleh sumber data lain berupa wawancara pernyataan untuk mendukung hasil penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data dari Pengguna Kuasa Anggaran, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang telah dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dalam bentuk jawaban tertutup.

D. Teknik Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Sebelumnya kuisoner terlebih dahulu dilakukan pengujian yaitu uji validitas dan uji reabilitas. Selanjutnya penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kinerja pemerintah kecamatan Datuk Bandar. Teknik pengumpulan Data mengenai implementasi Anggaran Berbasis Kinerja menggunakan kuesioner terstruktur terdiri dari pertanyaan tertutup berupa suatu daftar pernyataan yang diberikan atau disebarkan kepada responden untuk diisi berdasarkan persepsi masing-masing responden dengan menggunakan 9 pertanyaan untuk Perencanaan, 3 pertanyaan untuk Pelaksanaan/ Implementasi Anggaran, 3 pertanyaan untuk Pelaporan dan 3 pertanyaan untuk Evaluasi. Sedangkan pada variable Kinerja Pemerintah Pada Kecamatan Datuk Bandar menggunakan 7 pertanyaan. Data yang terkumpul dianalisis dengan uji chi square. Uji ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap Kinerja Pemerintah. Dengan Kinerja Pemerintah Kecamatan Datuk Bandar dengan tingkat pemaknaan p kurang dari 0,05. Formulasi pemaknaan p kurang dari 0,05 artinya menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dengan Kinerja Pemerintah.

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Uji Validitas

Uji ini perlu dilakukan karena jenis data penelitian adalah data Kualitatif. Pengujian validitas instrumen dengan menggunakan software SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Pearson Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik (r hitung $>$ r tabel) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh item pernyataan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak seluruh r hitung lebih besar r tabel. Dimana nilai r tabel untuk sampel sebanyak 20 adalah 0,359 sebagaimana dapat digambarkan pada tabel 4.1. dibawah ini:

Tabel 4.1. Uji Validitas

Perencanaan Anggaran	Pertanyaan 1	0,924	0,359	Valid
	Pertanyaan 2	0,784	0,359	Valid
	Pertanyaan 3	0,709	0,359	Valid
	Pertanyaan 4	0,873	0,359	Valid
	Pertanyaan 5	0,898	0,359	Valid
	Pertanyaan 6	0,587	0,359	Valid
	Pertanyaan 7	0,724	0,359	Valid
	Pertanyaan 8	0,770	0,359	Valid
	Pertanyaan 9	0,918	0,359	Valid
Pelaksanaan Anggaran	Pertanyaan 1	0,929	0,359	Valid
	Pertanyaan 2	0,923	0,359	Valid
	Pertanyaan 3	0,875	0,359	Valid
Pelaporan Anggaran	Pertanyaan 1	0,961	0,359	Valid
	Pertanyaan 2	0,933	0,359	Valid
	Pertanyaan 3	0,944	0,359	Valid
Evaluasi Anggaran	Pertanyaan 1	0, 891	0,359	Valid
	Pertanyaan 2	0,817	0,359	Valid
	Pertanyaan 3	0,876	0,359	Valid
Kinerja Aparatur Pemerintah	Pertanyaan 1	0,467	0,422	Valid
	Pertanyaan 2	0,569	0,422	Valid
	Pertanyaan 3	0,748	0,422	Valid
	Pertanyaan 4	0,557	0,422	Valid

	Pertanyaan 5	0,485	0,422	Valid
	Pertanyaan 6	0,492	0,422	Valid
	Pertanyaan 7	0,530	0,422	Valid

B. Uji Reabilitas

Berdasarkan Reliabilitas (kehandalan) merupakan suatu kestabilan dan konsisten responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang disusun dalam suatu bentuk kuesioner maka diperlukan uji reliabilitas (kehandalan). Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Reliabilitas dari pertanyaan kuisisioner yang telah diajukan penulis kepada responden dalam penelitian ini akan terlihat pada tabel *Reliability Statistic* yang disajikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2. Uji Reabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Ket
Perencanaan Anggaran	0,783	0,6	Realibel
Pelaksanaan Anggaran	0,865	0,6	Realibel
Pelaporan Anggaran	0,874	0,6	Realibel
Evaluasi Anggaran	0,849	0,6	Realibel
Kinerja Pemerintah	0,713	0,6	Realibel

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada masing – masing variabel item pernyataan dengan diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk pernyataan melalui kuesioner tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Kinerja Pemerintah adalah Reliabel / handal dan bisa diterima.

C. Statistik Deskriptif

1. Kinerja Pemerintah pada Kecamatan Datuk Bandar

Data terkait pencapaian kinerja pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar dijelaskan pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3
KINERJA PEMERINTAH

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid CUKUP	1	5.0	5.0	5.0
BAIK	19	95.0	95.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian kecil responden yaitu 5% menyebutkan Kinerja Pemerintah cukup dan hampir seluruh responden yaitu 95% menyatakan Kinerja Pemerintah baik.

a. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar

Pengaruh implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dianalisis dengan uji Chi Square dengan tingkat kemaknaan $\alpha = \leq 0.05$. Uji silang dilakukan terhadap hubungan antara Perencanaan, Pelaksanaan/ Implementasi, Pelaporan dan Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja. masing-masing akan dijelaskan pada bab berikut.

b. Pengaruh Perencanaan Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar.

Pengaruh Perencanaan Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Crosstab Pengaruh Perencanaan Dalam meningkatkan Kinerja Pemerintah

PERENCANAAN_ANGGARAN * KINERJA_PEMERINTAH Crosstabulation

Count		KINERJA_PEMERINTAH		Total
		CUKUP	YA	
PERENCANAAN_ANGGARAN	CUKUP	0	4	4
	YA	1	15	16
Total		1	19	20

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa terdapat 4 orang responden yang perencanaan anggaran cukup namun kinerja pemerintahnya sesuai (ya) dan 1 orang perencanaan anggarannya telah sesuai namun kinerja pemerintahnya cukup serta terakhir sebanyak 15 orang perencanaan anggarannya sesuai (ya) selaras dengan kinerja pemerintahnya. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja pemerintah dapat diketahui dari uji data Chi Square pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5 Uji Chi – Square :
Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Datuk Bandar
Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.263 ^a	1	.608		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.459	1	.498		
Fisher's Exact Test				1.000	.800
Linear-by-Linear Association	.250	1	.617		
N of Valid Cases ^b	20				

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20.

b. Computed only for a 2x2 table

Pada tabel Chi-Square test, baris pearson Chi-Square menunjukkan harga α 0,263 (a), $df = 2$, dan $p\text{-value} = 0,608 > 0,005$, artinya tidak ada pengaruh antara perencanaan anggaran dengan kinerja pemerintah di lingkungan Kecamatan Datuk Bandar. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keeratan pengaruh perencanaan anggaran kinerja dengan kinerja pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar dijabarkan pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel.4.6
(Symmetric Measures) Tingkat Keeratan hubungan Perencanaan Anggaran dengan Kinerja Pemerintah Kecamatan Datuk Bandar

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.114	.608
N of Valid Cases		20	

Pada tabel 4.6 (*Symmetric Measures*), diperoleh nilai *contingency Coefficient* sebesar 0,114 yang menunjukkan tingkat keeratan pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja pemerintah bernilai rendah artinya pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar menurut pendapat responden ini adalah rendah.

c. Pengaruh Pelaksanaan/ Implementasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar.

Tabel 4.7
Crosstab Pengaruh Pelaksanaan Dalam meningkatkan Kinerja Pemerintah
PELAKSANAAN_ANGGARAN * KINERJA_PEMERINTAH Crosstabulation

Count		KINERJA_PEMERINTAH		Total
		CUKUP	YA	
PELAKSANAAN_ANGGARAN	TIDAK	1	2	3
	CUKUP	0	1	1
	YA	0	16	16
Total		1	19	20

Dari tabel 4.7 diketahui bahwa terdapat 1 orang responden yang pelaksanaan anggaran tidak baik namun kinerja di pemerintahnya cukup dan 2 orang pelaksanaan anggaran tidak baik namun kinerja pemerintahnya sesuai (ya). Selanjutnya terdapat 1 orang pelaksanaan anggarann cukup namun kinerja pemerintahnya sesuai (ya). Terakhir sebanyak 16 orang pelaksanaan anggaran sesuai dan kesesuaiannya kinerjanya juga sesuai (ya). Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap kinerja pemerintah dapat diketahui dari uji data Chi Square pada tabel 4.8 dibawah ini :

Tabel 4.8 Uji Chi – Square :
Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Datuk Bandar

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.965 ^a	2	.051
Likelihood Ratio	4.122	2	.127
Linear-by-Linear Association	5.161	1	.023
N of Valid Cases	20		

a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05.

Pada tabel Chi-Square test, baris pearson Chi-Square menunjukkan harga α 5,965 (a), $df = 2$, dan $p\text{-value} = 0,051 > 0,005$, artinya tidak ada pengaruh antara pelaksanaan anggaran dengan kinerja pemerintah di lingkungan Kecamatan Datuk Bandar. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keeratan pengaruh pelaksanaan anggaran dengan kinerja pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar dijabarkan pada tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel.4.9
(Symmetric Measures) Tingkat Keeratan hubungan Pelaksanaan Anggaran dengan Kinerja Pemerintah Kecamatan Datuk Bandar

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.479	.051
N of Valid Cases	20	

Pada tabel 4.9 (*Symmetric Measures*), diperoleh nilai *contingency Coefficient* sebesar 0,479 yang menunjukkan tingkat keeratan pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap kinerja

pemerintah bernilai cukup artinya pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap kinerja pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar menurut pendapat responden ini adalah cukup.

d. Pengaruh Pelaporan Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar.

Tabel 4.10
Crosstab Pengaruh Pelaporan Anggaran Dalam meningkatkan Kinerja Pemerintah

PELAPORAN_ANGGARAN * KINERJA_PEMERINTAH Crosstabulation

Count		KINERJA_PEMERINTAH		Total
		CUKUP	YA	
PELAPORAN_ANGGARAN	TIDAK	0	3	3
	CUKUP	1	3	4
	YA	0	13	13
Total		1	19	20

Dari tabel 4.10 diketahui bahwa terdapat 3 orang responden yang pelaporan anggaran tidak baik namun kinerja di pemerintahnya sesuai (ya). Selanjutnya terdapat 1 orang pelaporan anggarannya cukup namun kinerja pemerintahnya juga cukup dan 3 orang yang pelaporan anggarannya cukup namun kinerja pemerintahnya sesuai (ya). Terakhir sebanyak 13 orang pelaporan anggaran sesuai dan kesesuaiannya kinerjanya juga sesuai (ya). Untuk mengetahui pengaruh pelaporan anggaran terhadap kinerja pemerintah dapat diketahui dari uji data Chi Square pada tabel 4.11 dibawah ini :

Tabel 4.11 Uji Chi – Square :
Pengaruh Pelaporan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Datuk Bandar

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	4.211 ^a	2	.122
Likelihood Ratio	3.442	2	.179
Linear-by-Linear Association	.455	1	.500
N of Valid Cases	20		

a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .15.

Pada tabel Chi-Square test, baris pearson Chi-Square menunjukkan harga α 4,211 (a), $df = 2$, dan $p\text{-value} = 0,122 > 0,005$, artinya tidak ada pengaruh antara pelaporan anggaran dengan kinerja pemerintah di lingkungan Kecamatan Datuk Bandar. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keeratan pengaruh pelaporan anggaran dengan kinerja pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar dijabarkan pada tabel 4.12 dibawah ini.

Tabel.4.12
(Symmetric Measures) Tingkat Keeratan hubungan Pelaporan Anggaran dengan Kinerja Pemerintah Kecamatan Datuk Bandar

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.417	.122
N of Valid Cases		20	

Pada tabel 4.12 (*Symmetric Measures*), diperoleh nilai *contingency Coefficient* sebesar 0,417 yang menunjukkan tingkat keeratan pengaruh pelaporan anggaran terhadap

kinerja pemerintah bernilai cukup artinya pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap kinerja pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar menurut pendapat responden ini adalah cukup.

e. **Pengaruh Evaluasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar.**

Tabel 4.13
Crosstab Pengaruh Evaluasi Anggaran Dalam meningkatkan Kinerja Pemerintah

EVALUASI_ANGGARAN * KINERJA_PEMERINTAH Crosstabulation

Count		KINERJA_PEMERINTAH		Total
		CUKUP	YA	
EVALUASI_ANGGARAN	CUKUP	1	7	8
	YA	0	12	12
Total		1	19	20

Dari tabel 4.13 diketahui bahwa terdapat 1 orang responden yang evaluasi anggaran cukup dan kinerja di pemerintahnya cukup. Selanjutnya terdapat 7 orang evaluasi anggarann cukup namun kinerja pemerintahnya sesuai (ya). Selanjutnya terdapat 12 orang evaluasi anggarannya sesuai (ya) dan kinerja pemerintahannya sesuai (ya). Untuk mengetahui pengaruh pelaporan anggaran terhadap kinerja pemerintah dapat diketahui dari uji data Chi Square pada tabel 4.14 dibawah ini :

Tabel 4.14 Uji Chi – Square :
Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Datuk Bandar

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.579 ^a	1	.209		
Continuity Correction ^b	.044	1	.834		
Likelihood Ratio	1.912	1	.167		
Fisher's Exact Test				.400	.400
Linear-by-Linear Association	1.500	1	.221		
N of Valid Cases ^b	20				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40.

b. Computed only for a 2x2 table

Pada tabel Chi-Square test, baris pearson Chi-Square menunjukkan harga α 1,579 (a), $df = 1$, dan $p\text{-value} = 0,209 > 0,005$, artinya tidak ada pengaruh antara evaluasi anggaran dengan kinerja pemerintah di lingkungan Kecamatan Datuk Bandar. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keeratan pengaruh evaluasi anggaran dengan kinerja pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar dijabarkan pada tabel 4.15 dibawah ini.

Tabel.4.15
(Symmetric Measures) Tingkat Keeratan hubungan Evaluasi Anggaran dengan Kinerja Pemerintah Kecamatan Datuk Bandar

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.271	.209
N of Valid Cases	20	

Pada tabel 4.1.4.4.c (*Symmetric Measures*), diperoleh nilai *contingency Coefficient* sebesar 0,271 yang menunjukkan tingkat keeratan pengaruh evaluasi anggaran terhadap

kinerja pemerintah bernilai rendah artinya pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar menurut pendapat responden ini adalah rendah.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Perencanaan anggaran disusun untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan disusunnya Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Lemahnya keeratn hubungan antara perencanaan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar menunjukkan bahwa fungsi perencanaan pejabat struktural pada dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar lemah meskipun demikian komitmen mereka terhadap tujuan organisasai sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa meskipun mereka lemah di perencanaan tapi kinerja pemerintahnya tinggi.

1. Pengaruh Keeratn Pelaksanaan Anggaran dengan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar

Pelaksanaan Anggaran meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah (SEKDA). Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya.

Pengaruh pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap Kinerja Pemerintah bernilai Cukup kinerja pada dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar terkait dengan pembagian tugas pada pejabat struktural dimana adanya pembagian kegiatan yang kurang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. hal ini mungkin disebabkan keterbatasan tenaga yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai dan selaras sehingga meskipun secara tugas pokok dan fungsi ada dalam lingkup jabatannya tapi dalam pelaksanaan anggaran respoden tersebut tidak ikut melaksanakan sedikit sehingga mereka menjawab pelaksanaan anggaran terhadap kinerjanya telah sesuai.

2. Pengaruh Keeratn Pelaporan Anggaran dengan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara periodik yang mencakup Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di seluruh lingkungan kecamatan Datuk Bandar yang merupakan tugas dari bagian keuangan sehingga wajar saja apabila responden menyatakan bahwa hubungan antara laporan pelaksanaan anggaran dengan kinerja pemerintah cukup.

3. Pengaruh Keeratn Evaluasi Anggaran dengan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Datuk Bandar

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja anggaran cukup lemah mempengaruhi kinerja pada dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar yang artinya menunjukkan bahwa pejabat structural mempunyai komitmen yang kurang untuk selalu melakukan evaluasi anggaran secara periodik. Hal ini dibuktikan dengan 7 orang responden menyatakan melakukan evaluasi anggaran dalam kategori cukup

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka Penulis menyimpulkan tentang Implentasi Anggaran Berbasis Knerja pada Kecamatan Datuk Bandar sebagai berikut.

1. Dari faktor perencanaan diketahui sebanyak 4 responden menyatakan terlibat keterlibatannya cukup dalam perencanaan anggaran dan sebagian besar responden 16 orang menyatakan terlibat dalam perencanaan anggarannya telah sesuai atau baik.

2. Dari faktor pelaksanaan diketahui sebagian kecil responden 3 orang menyatakan keterlibatannya pelaksanaan anggaran tidak baik, sebagian kecil 1 orang keterlibatannya pelaksanaan anggarannya menyatakan cukup baik dan sebanyak 16 orang menyatakan keterlibatan dalam pelaksanaan anggaran telah sesuai atau baik.
3. Dari faktor Pelaporan diketahui sebagian kecil yaitu 3 orang responden menyatakan keterlibatannya pelaporan anggaran tidak baik selanjutnya sebanyak 4 orang responden menyatakan keterlibatannya pelaporan anggaran cukup baik dan sebagian besar responden yaitu 13 orang menyatakan keterlibatannya pelaporan anggarannya telah sesuai atau baik.
4. Dari Faktor Evaluasi diketahui sebagian responden yaitu 8 orang menyatakan keterlibatannya dalam Evaluasi anggaran hampir cukup dan sebagian besar responden sebanyak 12 orang menyatakan keterlibatannya Evaluasi anggaran telah sesuai atau baik.

Maka dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh aktivitas anggaran berbasis kinerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi sebagai bentuk peningkatan kinerja di seluruh instansi yang ada kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai telah sesuai atau berjalan dengan baik.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan yang telah dikemukakan maka, penulis dapat memberikan saran / masukan bagi pimpinan seluruh lingkungan Kecamatan Datuk Bandar sebagai berikut:

1. Hendaknya dapat lebih mengoptimalkan peran masing – masing Pejabat Struktural dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran sebagai upaya peningkatan Kinerja.
2. Hendaknya Pemerintah di Kecamatan mengadakan Bimbingan teknis pada pejabat struktural terkait dengan anggaran secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT INDEKS.
- Haryanto, 2009, *Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tahun 2007*, Tesis S2 Program Pasca sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2009, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., Purwanugraha, H. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Penerbit ANDI.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pramono H, dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinambela, Elizar, 2003, *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial*, Tesis S2 Program Pasca sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Undang – Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999.
- Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Whicker, Marcia Lynn. 2002, *Federal Deficit and Financing the National Debt. In: Handbook of Fiscal Policy*. New York: Marcel Dekker Inc.
- Umar, Husein, 2008, *Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan.*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yuwono, S, I.T. Agus, dan Hariyadi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Bayumedia Publising, Malang